



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PEMERINTAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIYONO BAMBANG Satriya
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TRANTIBUM DAN PERTANAHAN
3. NHK : 221212

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	580.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/80 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/29 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/30 m2 di SEMARANG, LAINNYA Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	186.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, HONDA MPV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.592.728
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	785.592.728
III. HUTANG	Rp.	420.286.590
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	365.306.138

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.